

ISLAM DAN KEBANGSAAN

Temuan Survey Nasional

Jajat Burhanudin

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)

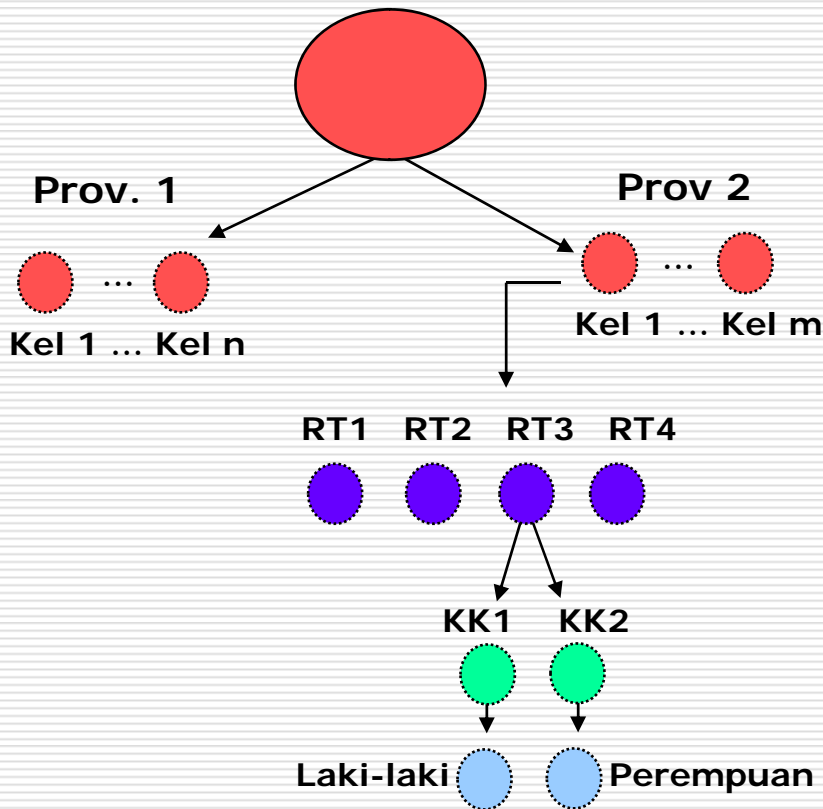
UIN Jakarta

2007

METODOLOGI SURVEI

- Wilayah: Nasional
 - Metode: *multi-stage random sampling*
 - Jumlah Responden:
1.200, dengan data valid 1.173 responden
 - Tentang responden:
 - 17-60 tahun
 - Laki-laki (50%) dan Perempuan (50%)
 - Kota (42%) dan Desa (58%)
 - *Margin of error:*
+/- 3% (pada tingkat kepercayaan 95%)
-

FLOWCHART PENENTUAN RESPONDEN SURVEI



Populasi kelurahan/desa
Di tingkat nasional

Kelurahan/desa di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap kelurahan/desa terpilih dipilih sebanyak 4 RT dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan

Latar Belakang

- Berbagai peristiwa yang terjadi selama satu dasawarsa terakhir cukup menyediakan alasan bagi kita untuk bertanya kembali tentang kebangsaan masyarakat Indonesia;
 - Menguatnya berbagai Konflik yang melibatkan perbedaan etnis (Dayak-Madura), agama (Ambon dan Poso), aliran keagamaan (Ahmadiyah), kaum minoritas (anti-Cina), dsb.;
 - Konflik horizontal tersebut selanjutnya diperkuat konflik pusat daerah (seperti kasus Aceh dan Papua) yang bisa mengancam keutuhan wilayah negara Indonesia;
-

Latar Belakang ...

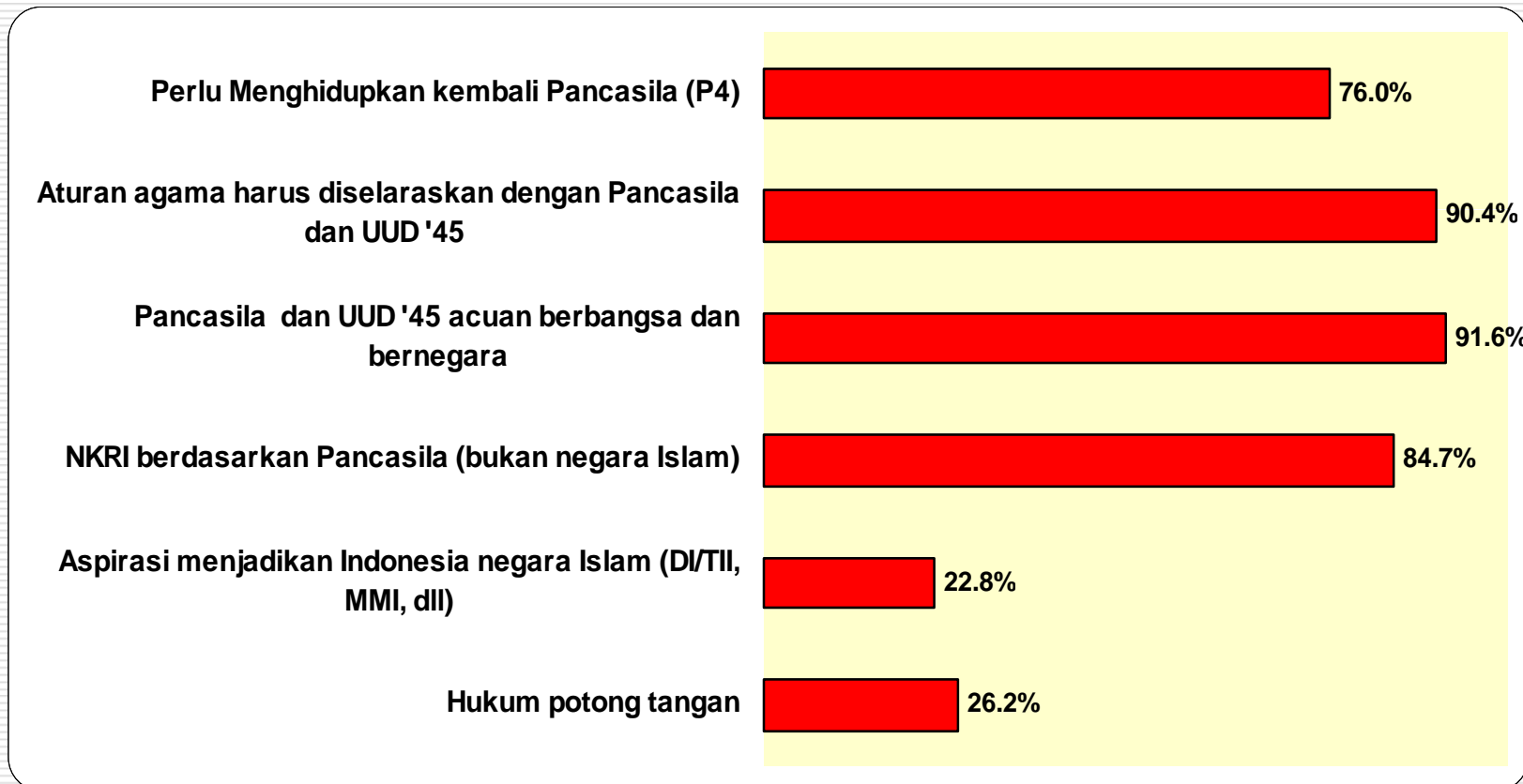
- Semua perkembangan tersebut membuat kita sulit mengingkari kenyataan bahwa pemerintah pusat tidak mengantongi legitimasi penuh dari daerah;
 - Legitimasi tersebut semakin terlihat tipis ketika menimbang keinginan masyarakat untuk mereformasi negara secara radikal; Tidak saja mengkritisi perilaku aparat negara, tapi juga menaruh kecurigaan besar terhadap segala sesuatu yang datang dari pemerintah.
 - Jika kondisi demikian terus bergulir, gesekan sosial yang bersifat vertikal akan dengan sendirinya menyatu dengan yang horizontal untuk kemudian berkembang menjadi persoalan nasional.
-

Beberapa pertanyaan

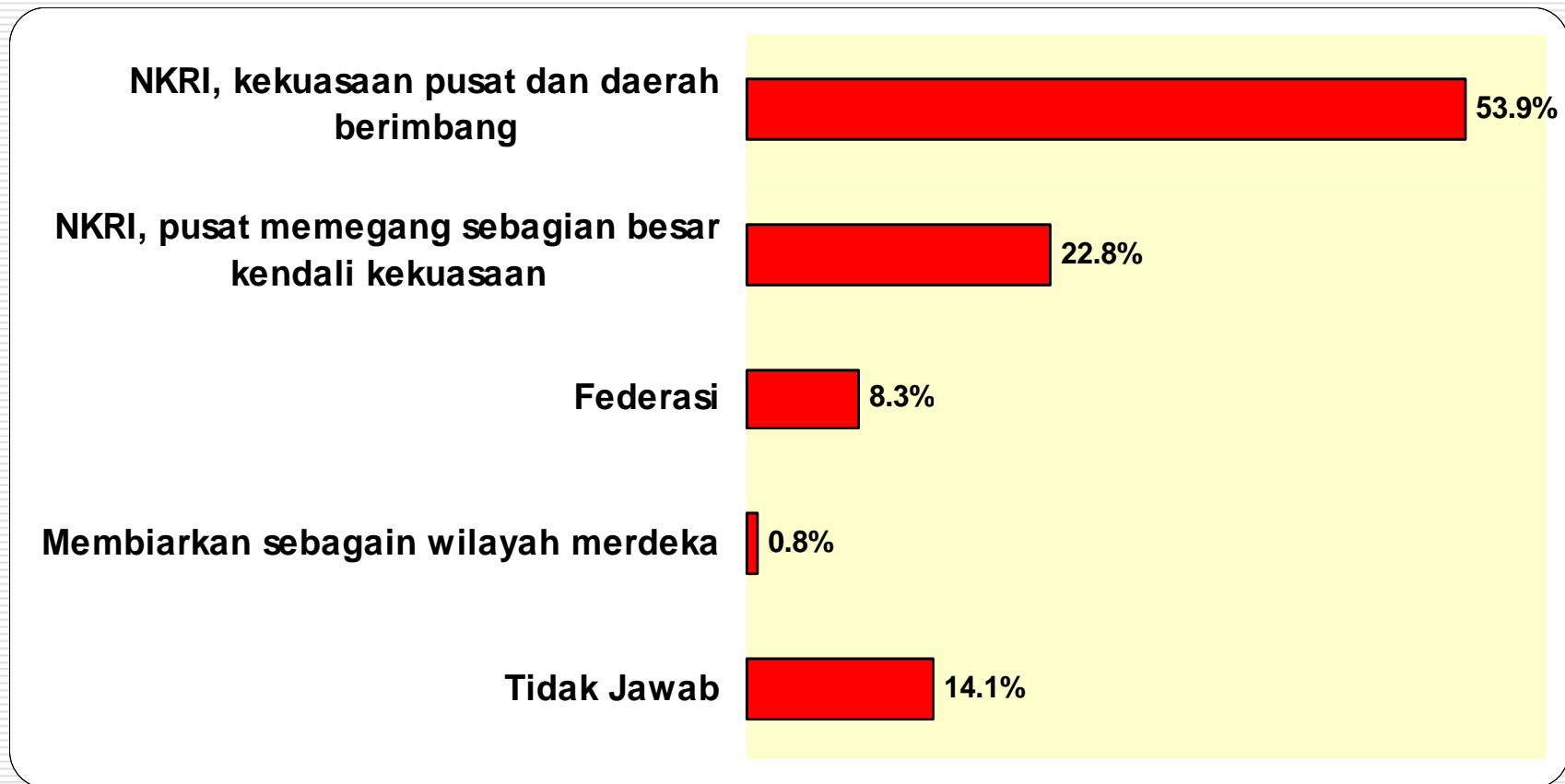
- ❑ Seperti apa gambaran kohesi sosial, kultural dan politik yang berkembang saat ini?
 - ❑ Apakah konflik dan fragmentasi sosial yang terjadi belakangan merupakan proses wajar dari transisi politik ataukah ancaman nyata terhadap kehidupan berbangsa?
 - ❑ Apakah fungsi institusi negara masih efektif dan simbol kebangsaan masih mengikat?
-

Temuan Survey

Apakah anda setuju dengan pandangan-pandangan berikut? (setuju dan sangat setuju)



Jika diadakan referendum, apa model pemerintahan yang akan anda pilih?



Apakah anda setuju dengan pandangan-pandangan berikut? (setuju dan sangat setuju)

Indonesia perlu mengurangi pembelian barang luar negeri untuk melindungi produk dalam negeri



Televisi Indonesia harus memprioritaskan penayangan acara, film, dan berita yang dibuat orang Indonesia



Lembaga-Lembaga internasional tidak dibolehkan ikut menyelesaikan persoalan di Indonesia



Diskusi

- ❑ Dari data di atas, secara umum tingkat kesetiaan ideologis dan kecintaan terhadap negara di kalangan masyarakat Indonesia tinggi.
 - ❑ NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diakui sudah final sebagai bentuk pemerintahan Indonesia; sebaliknya, cita-cita negara Islam masih dipegang sebagian kecil rakyat Indonesia.
 - ❑ Begitu pula Pancasila diterima sebagai ideologi negara secara penuh; Pancasila bersama UUD '45 merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
-

Diskusi ...

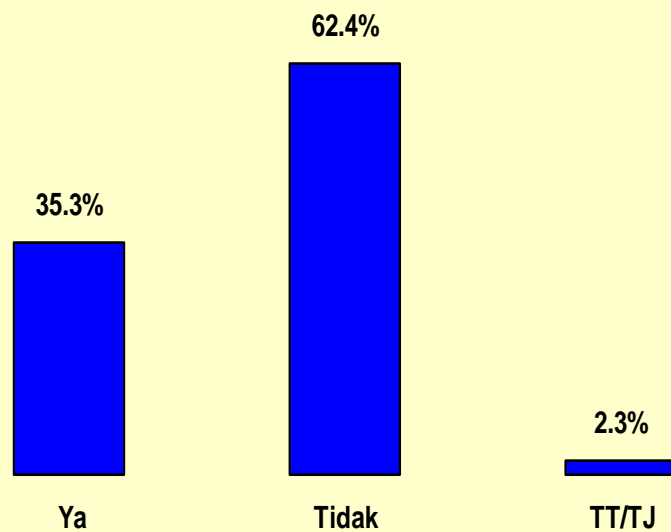
- ❑ Masyarakat Indonesia juga memiliki tingkat kecintaan pada negara yang tinggi; meskipun hal itu tidak begitu berlaku jika negara berbuat salah.
 - ❑ Bila pada tingkat ideologis tidak bermasalah, bagaimana dengan aspek lain dari nasionalisme atau kebangsaan. Ideologi tidak bisa berdiri sendiri. Ia mensyaratkan antara lain kondisi kultural masyarakat yang bisa mendukung bekerjanya ideologi secara efektif dalam kehidupan bernegara.
 - ❑ Salah satu aspek penting untuk diperhatikan adalah modal sosial-budaya bagi bekerjanya ideologi negara. Dan salah satunya yang penting adalah kesediaan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan kelompok lain.
-

Diskusi...

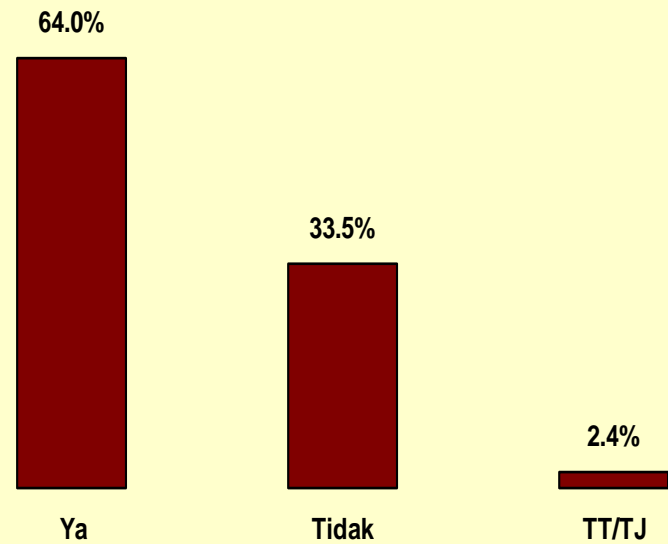
- Dengan kata lain, pertanyaannya kemudian: sejauhmana bangsa Indonesia [kaum Muslim] bersikap pluralis dan toleran terhadap pemeluk agama berbeda [baca: non-Muslim]?
 - Dalam konteks ini, sikap pluralis dan toleran dirumuskan ke dalam sejumlah pertanyaan untuk mengukur tingkat kesediaan Muslim hidup berdampingan dengan komunitas beda agama yang ada di Indonesia.
 - Selanjutnya, bagaimana sikap pluralis dan toleran tersebut memiliki makna yang berarti dalam kehidupan sosial-politik dan kenegaraan di Indonesia. Berikut adalah temuan survey PPIM 2007 tentang pluralisme dan toleransi di Indonesia.
-

Membolehkan non-Muslim ...

Menjadi Presiden

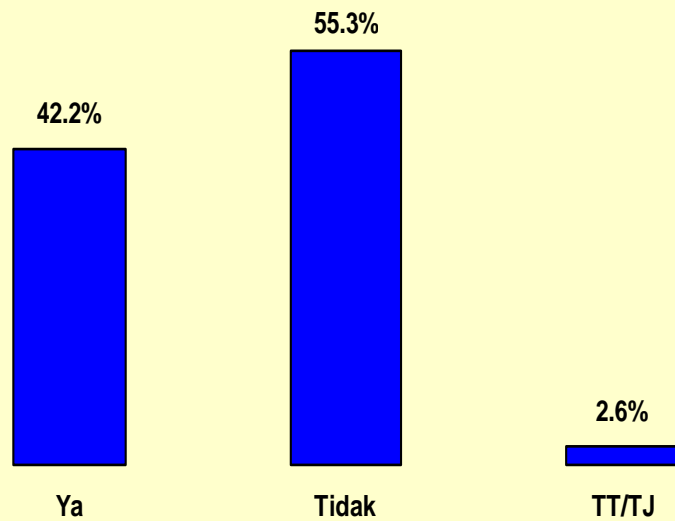


Menjadi guru di sekolah umum

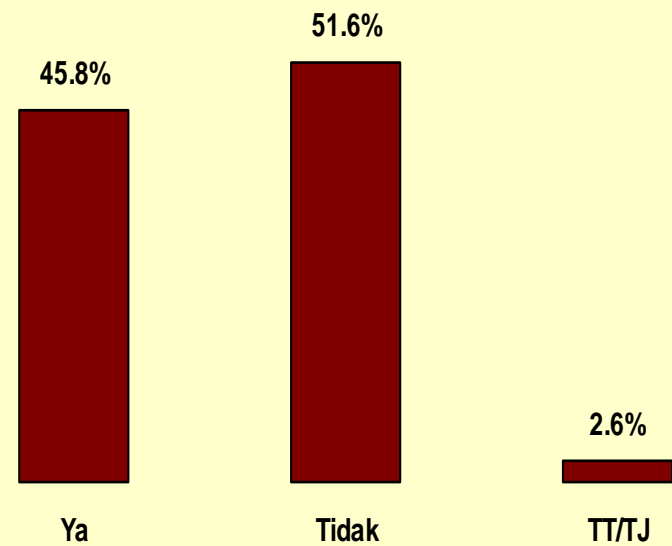


Membolehkan non-Muslim ...

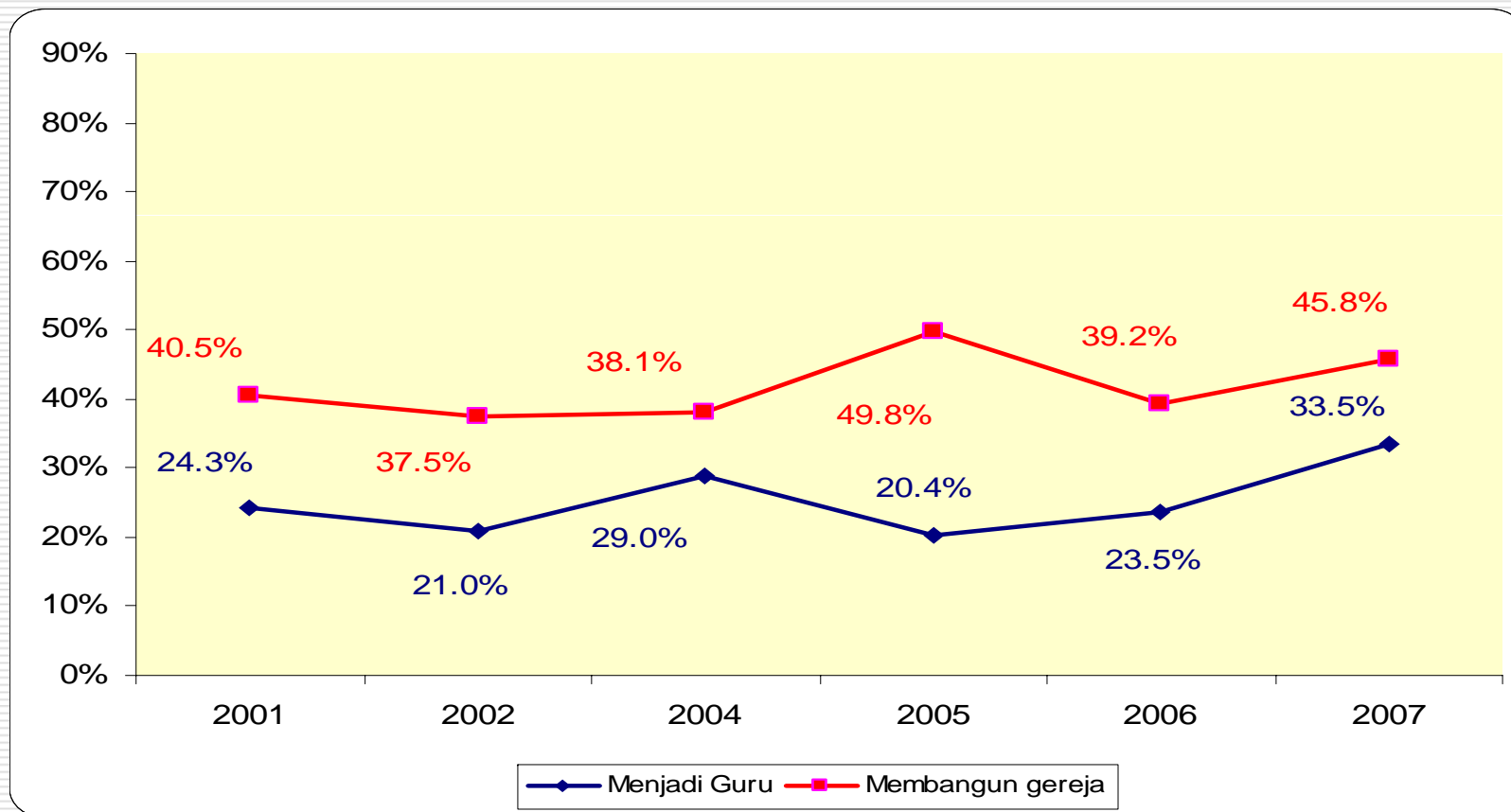
Mengadakan acara kabaktian di lingkungan sekitar



Membangun Gereja



Keberatan jika non-Muslim menjadi guru di sekolah umum dan membangun rumah ibadah di lingkungan sekitar



Diskusi...

- ❑ Data statistik di atas menyuguhkan bukti bahwa derajat toleransi di kalangan Muslim Indonesia relatif rendah. Prosentase mereka yang setuju non-Muslim membangun tempat ibadah (gereja) di lingkungan sekitar di bawah mereka yang menolak (45.8% berbanding 51.6%);
 - ❑ Hal serupa juga berlaku untuk dukungan terhadap praktik keagamaan non-Islam di lingkungan Muslim. Prosentase yang mendukung (42.2%) berada di bawah mereka yang menolak (55.3%).
 - ❑ Data ini berarti bahwa prosentase dukungan terhadap toleransi dan pluralisme lebih kecil [meski sedikit] dibanding prosentase penolakan terhadap kedua isu tersebut.
-

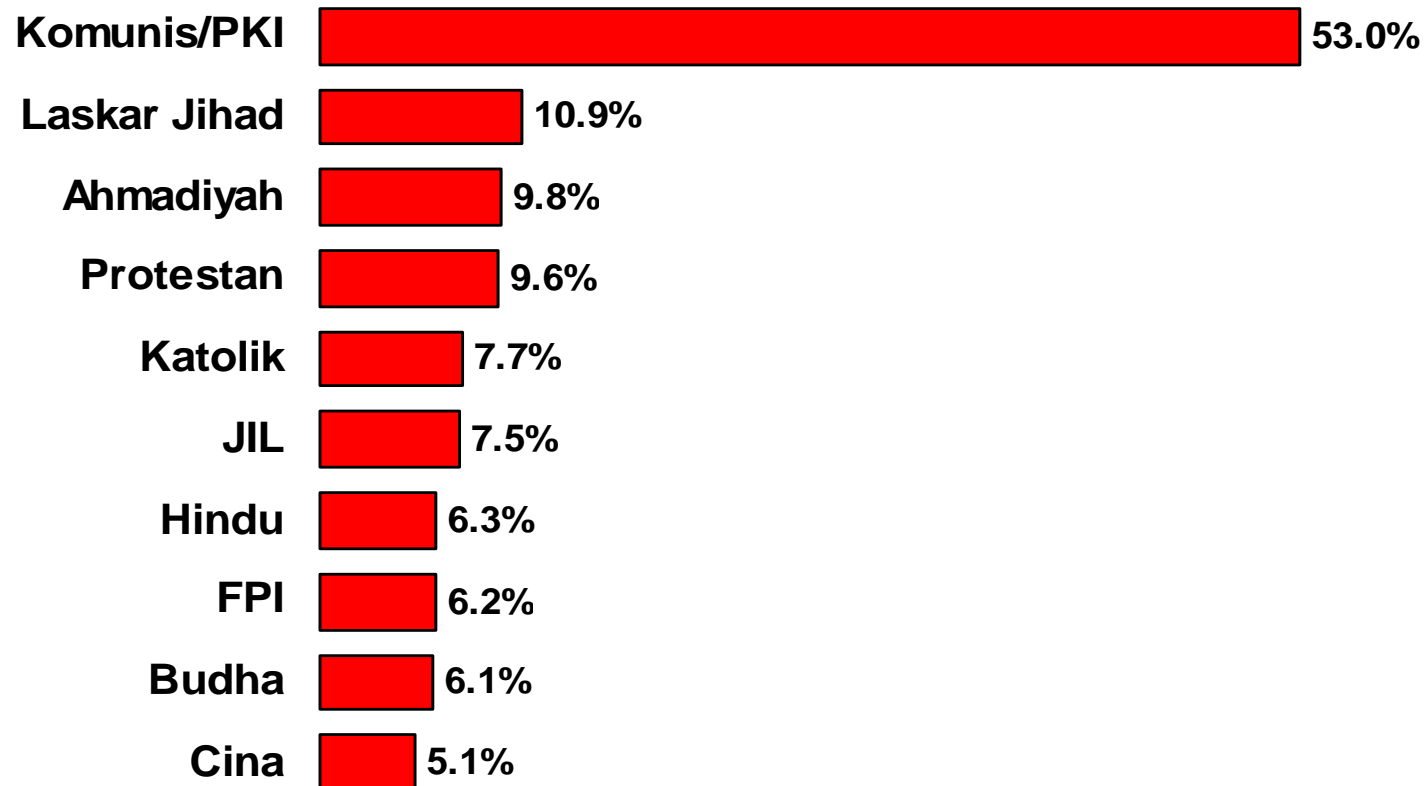
Diskusi ...

- ❑ Perbedaan sikap tersebut bahkan lebih kentara untuk isu-isu tertentu yang bersifat politik dan strategis, serta berhubungan langsung dengan kepentingan publik;
 - ❑ Dalam isu presiden, seperti tampak dalam slide sebelumnya, sebagian besar responden (62.4%) menolak jika non-Muslim menjabat posisi politik tersebut. Dan prosentase tersebut jauh di atas mereka yang bersikap sebaliknya (35.3%).
 - ❑ Bila demikian, maka sikap Muslim Indonesia menyangkut isu toleransi dan pluralisme masih didominasi oleh sentimen dan kepentingan kelompok sebagai umat, ketimbang sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk.
-

Diskusi ...

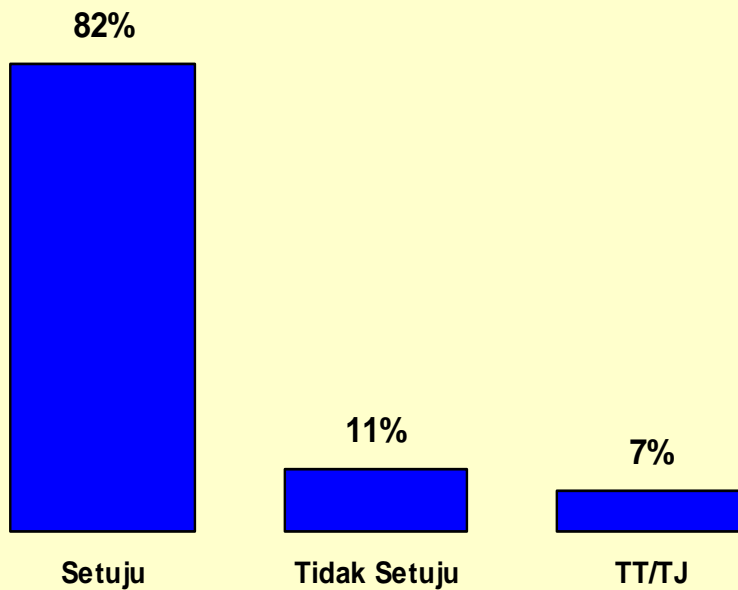
- ❑ Sikap intoleransi ini memang semakin meningkat (hasil survey PPIM sejak 2001). Seperti tampak pada slide sebelumnya, tingkat keberatan kaum Muslim jika non-Muslim menjadi guru di sekolah umum dan membangun tempat ibadah menjadi ilustrasi menarik dari menguatnya intoleransi keagamaan tersebut;
 - ❑ Selain bersifat keagamaan, sikap intoleransi dengan derajat kurang lebih sama juga berlaku di bidang politik. Sebagaimana bisa dilihat pada slide berikut, kaum Muslim Indonesia bersikap kurang toleran terhadap kelompok-kelompok sosial yang dibenci (mereka keberan untuk menjadi tetangga).
-

Keberatan bertetangga dengan kelompok-kelompok sosial berikut (pilihan responden lebih dari satu)

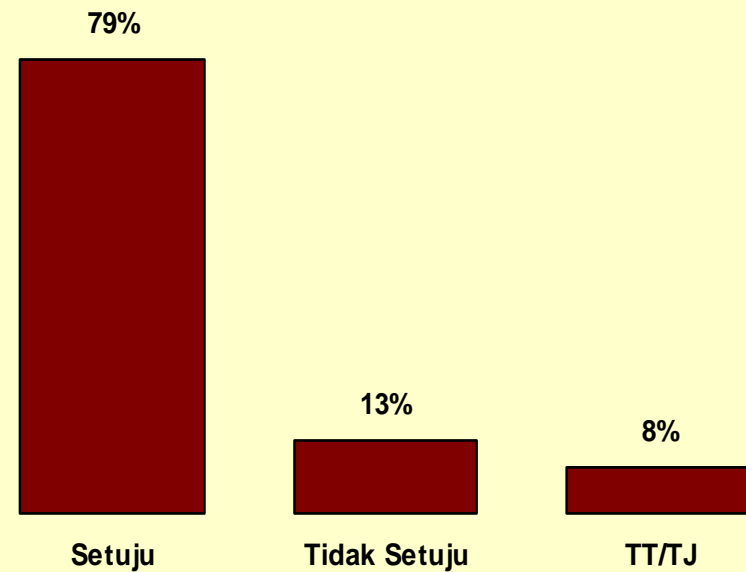


Setuju jika anggota kelompok dibenci tersebut ... (setuju dan sangat setuju)

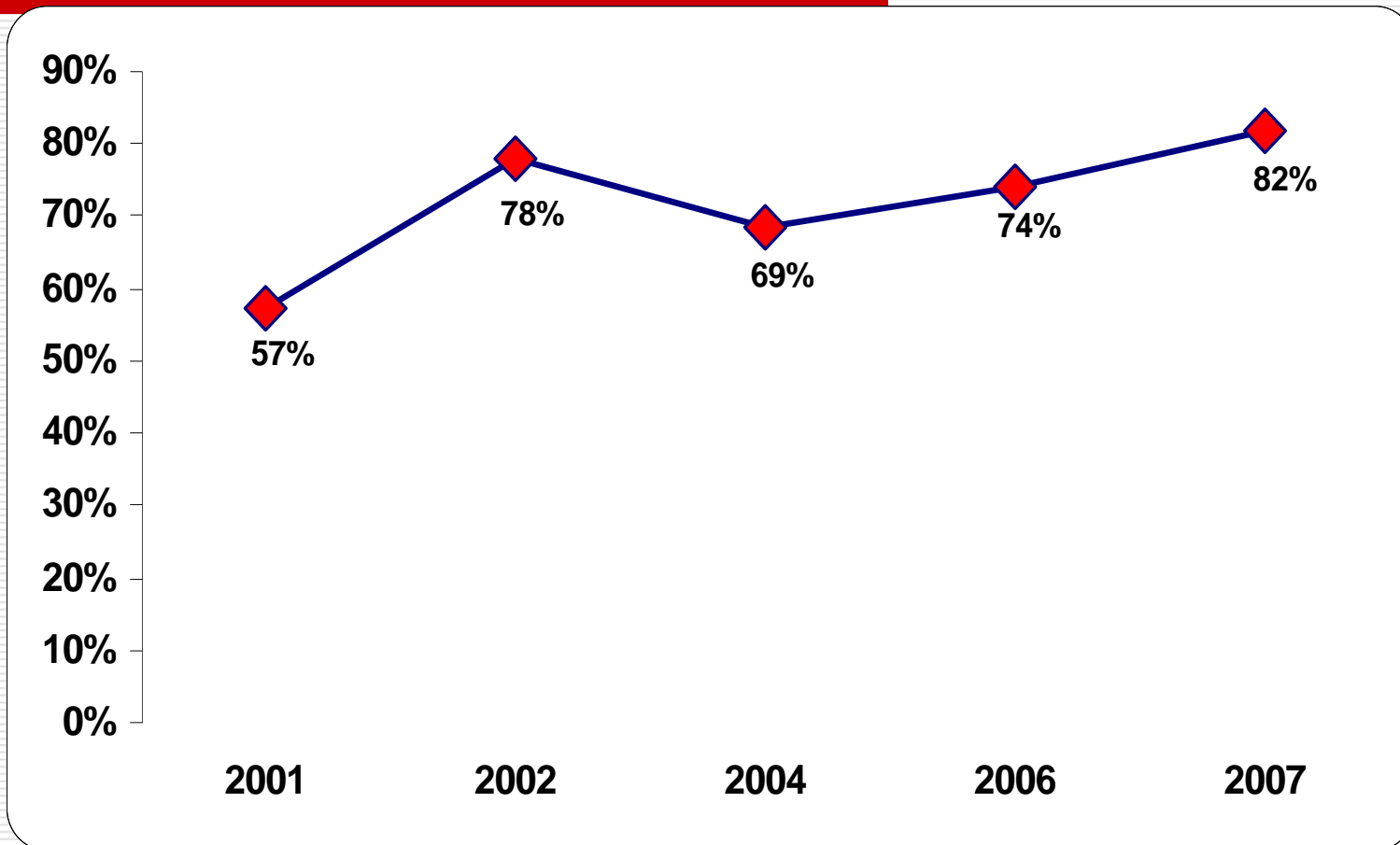
diawasi oleh polisi



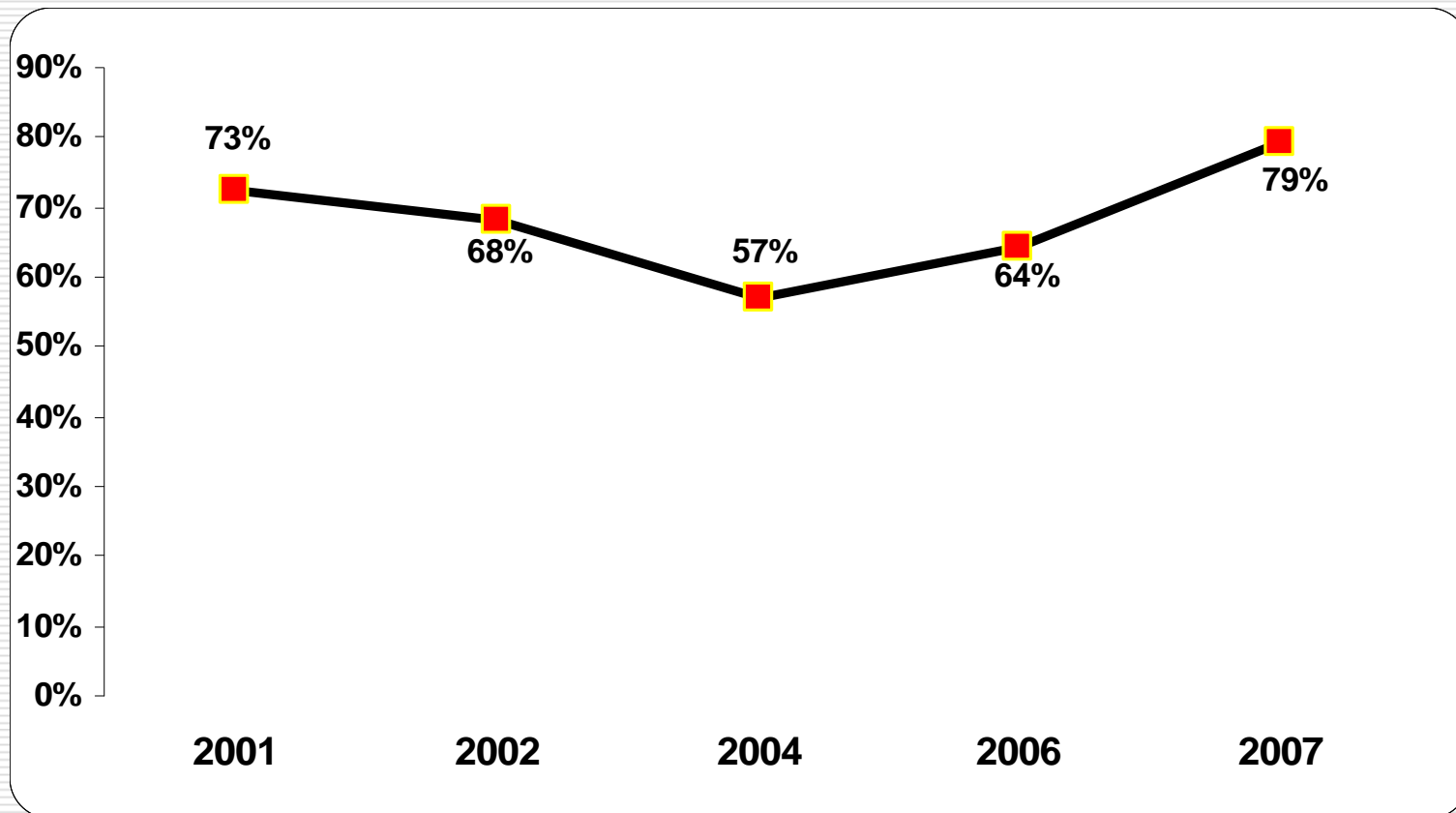
dilarang menjadi guru di sekolah umum



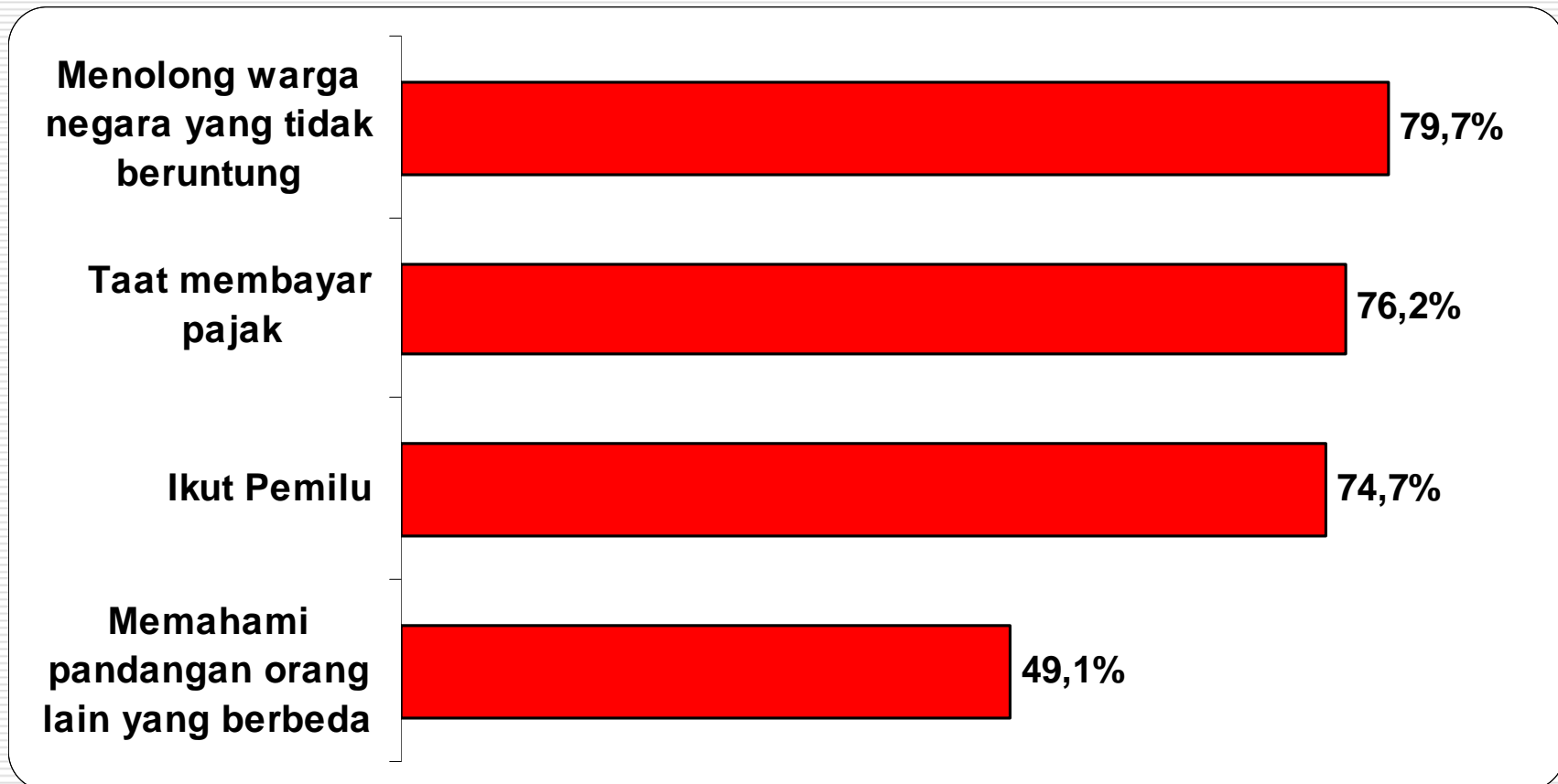
Dukungan jika anggota kelompok yang dibenci diawasi secara khusus oleh polisi (setuju dan sangat setuju)



Dukungan jika anggota kelompok yang dibenci dilarang menjadi guru di sekolah umum (setuju dan sangat setuju)



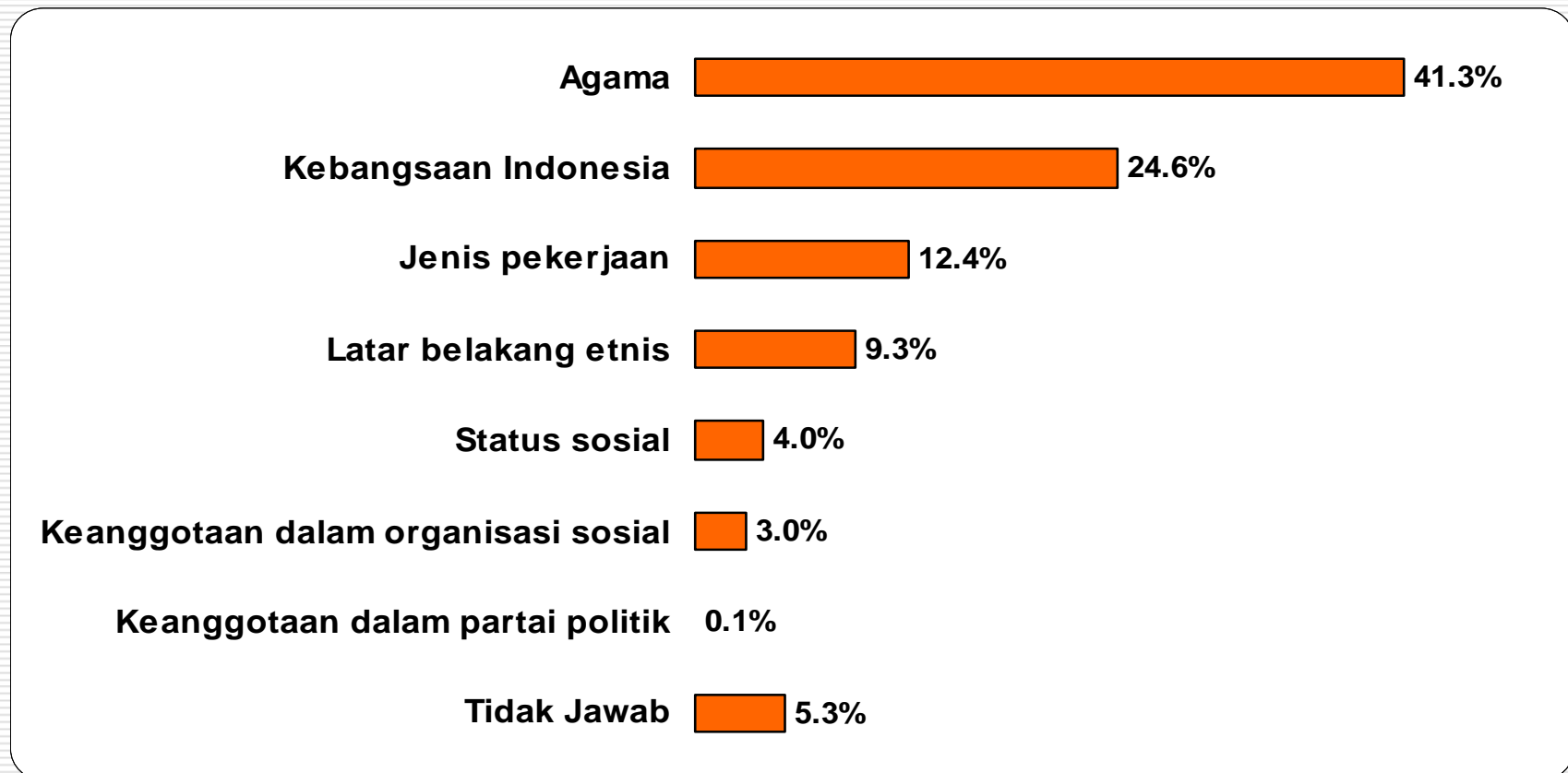
Pandangan responden tentang warga negara yang baik (sangat penting)



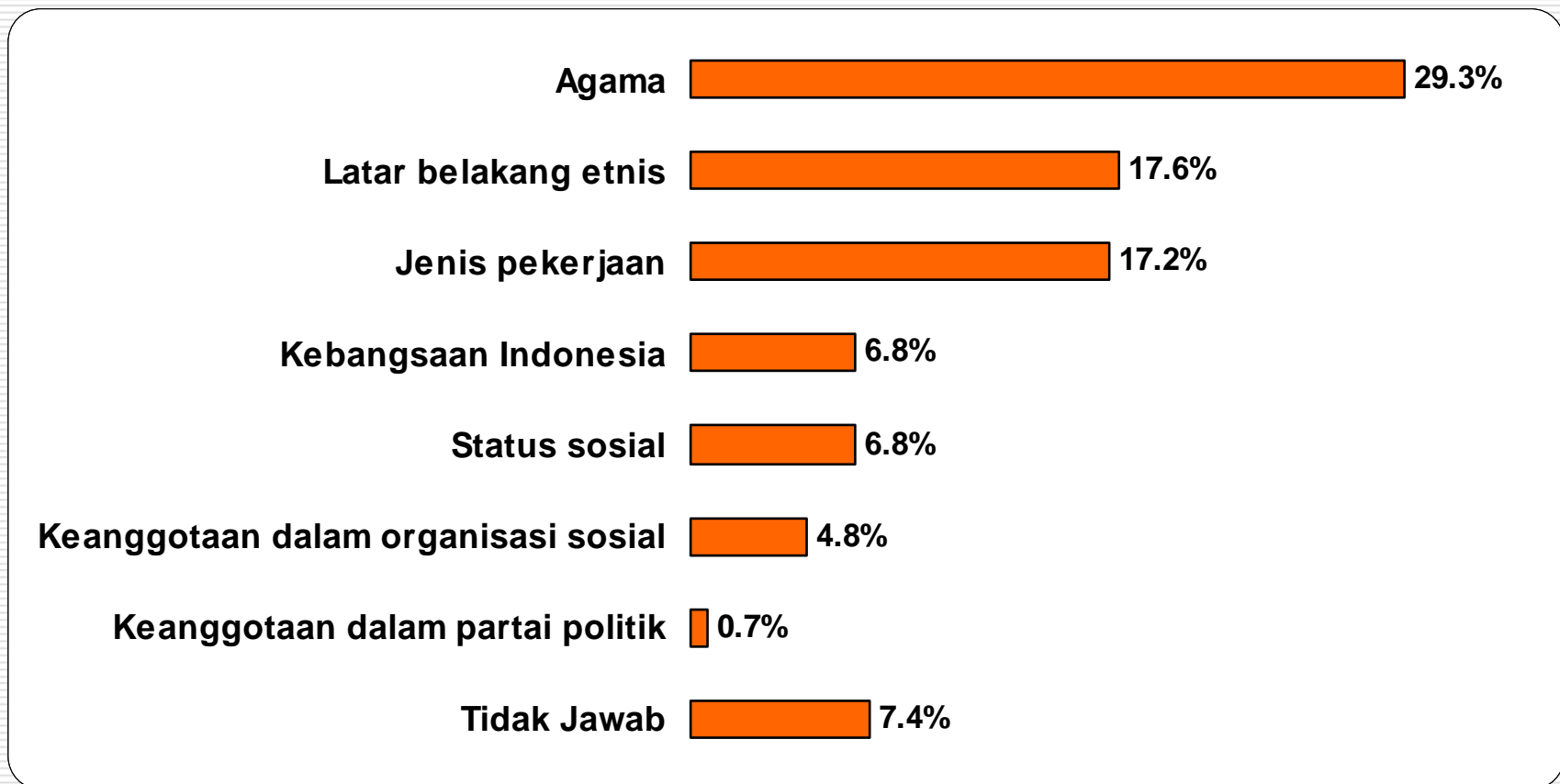
Diskusi

- Data di atas memberikan bukti bahwa sikap intoleransi sosial-politik tumbuh sejalan dengan tingkat intoleransi keagamaan; bahwa keduanya memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun;
 - Dalam konteks ini, poin penting untuk ditekankan adalah bahwa sikap intoleransi tersebut (khususnya keagamaan) memiliki korelasi positif dengan menguatnya agama dalam kehidupan sosial-politik dan kenegaraan. Hal ini berarti bahwa semakin seseorang bersikap tidak toleran sangat mungkin bahwa dia menjadikan agama sebagai dasar perumusan identitas dan selanjutnya sikap dan perilaku sosial-politik dan kenegaraan.
-

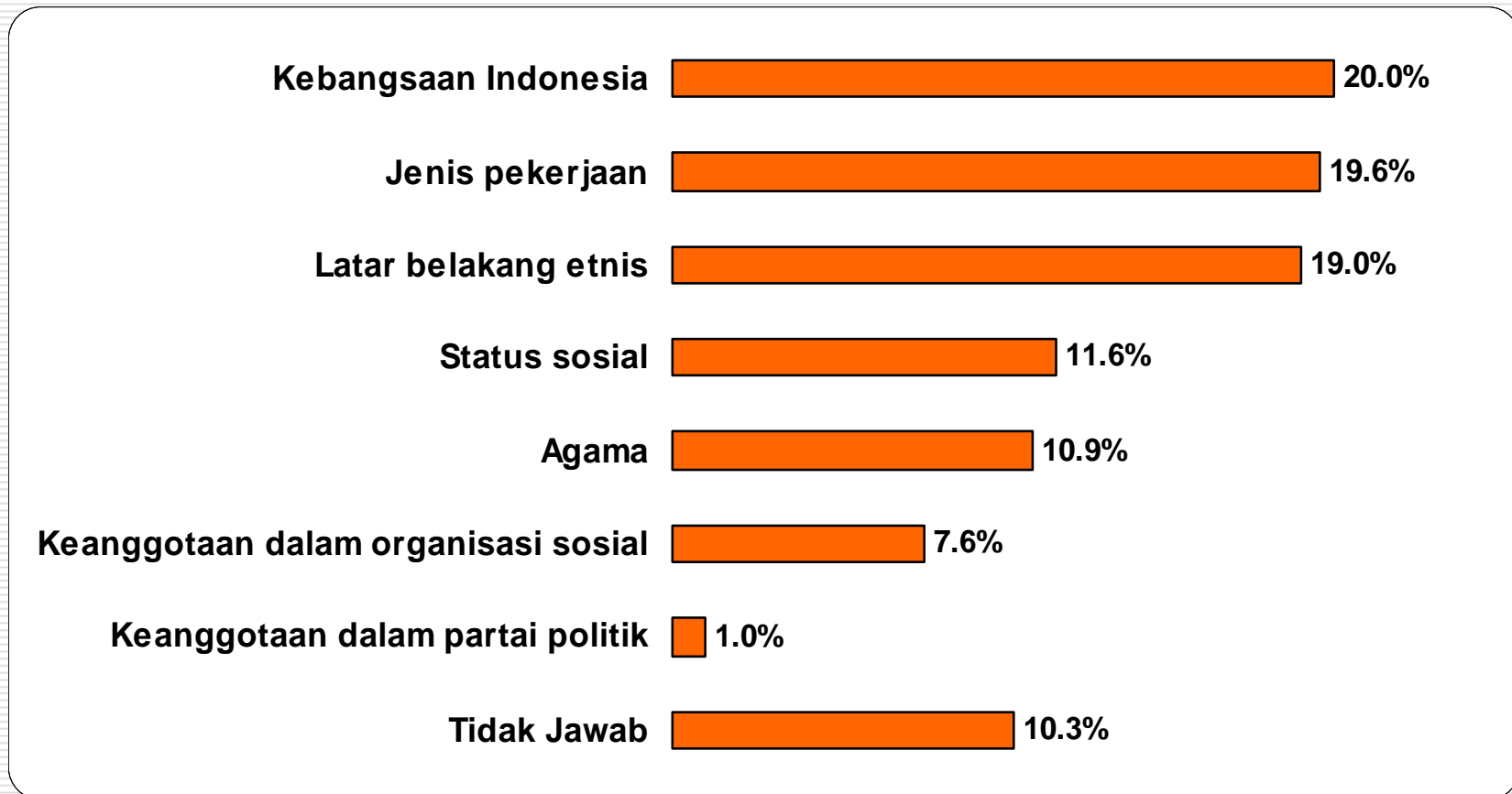
Faktor terpenting pertama yang menjadi dasar perumusan identitas diri



Faktor terpenting kedua (%)



Faktor terpenting ketiga (%)



Diskusi

- Dalam tabel di atas, agama tampil sebagai satu kategori terpenting dalam perumusan identitas seseorang; posisi agama berada jauh di atas kebangsaan. Ini bisa diartikan, unsur dan simbol agama jauh lebih kuat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat ketimbang kebangsaan.
 - Dalam uji statistik, kuatnya ikatan keagamaan ini memiliki korelasi negatif dengan derajat kesetiaan ideologis atas negara ($r = -.136$).
 - Jadi, rendahnya kesetiaan terhadap ideologi berhubungan dengan semakin kuatnya seseorang menjadikan agama sebagai dasar perumusan identitas. Dan hal itulah yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini.
-

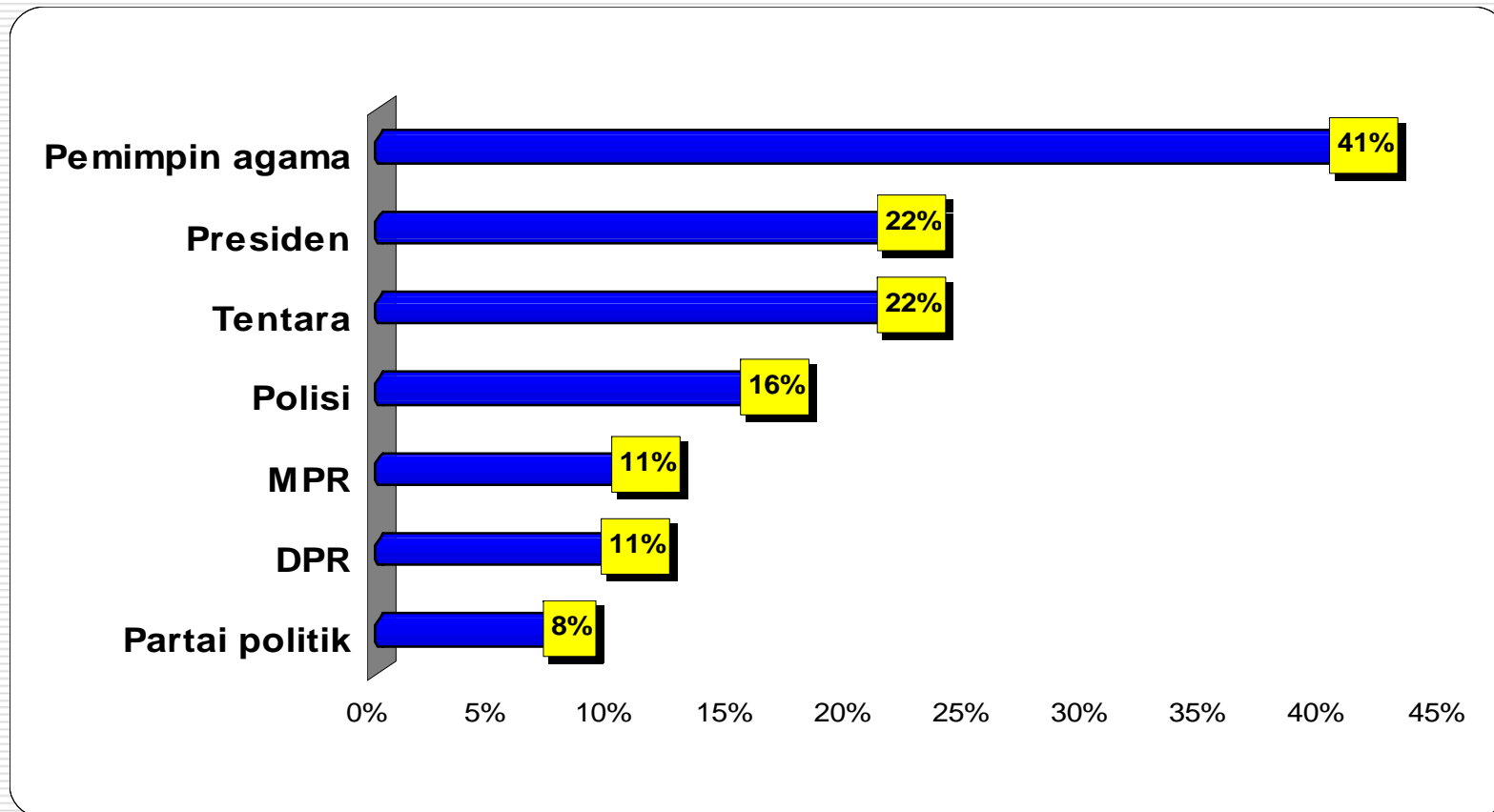
Diskusi ...

- Bila demikian, maka pertanyaannya kemudian adalah faktor apa saja yang mendorong seseorang meletakkan agama sebagai dasar perumusan identitas, melampaui faktor-faktor lain terutama kebangsaan?
 - Hasil survey ini menunjukkan bahwa intoleransi keagamaan (sikap tidak bersedia hidup berdampingan dan menerima keberadaan serta hak-hak penganut agama berbeda [baca: non-Muslim]) merupakan faktor terdepan.
 - Intoleransi keagamaan memiliki hubungan positif dengan sikap menjadikan agama sebagai dasar perumusan identitas utama ($r = .147$).
-

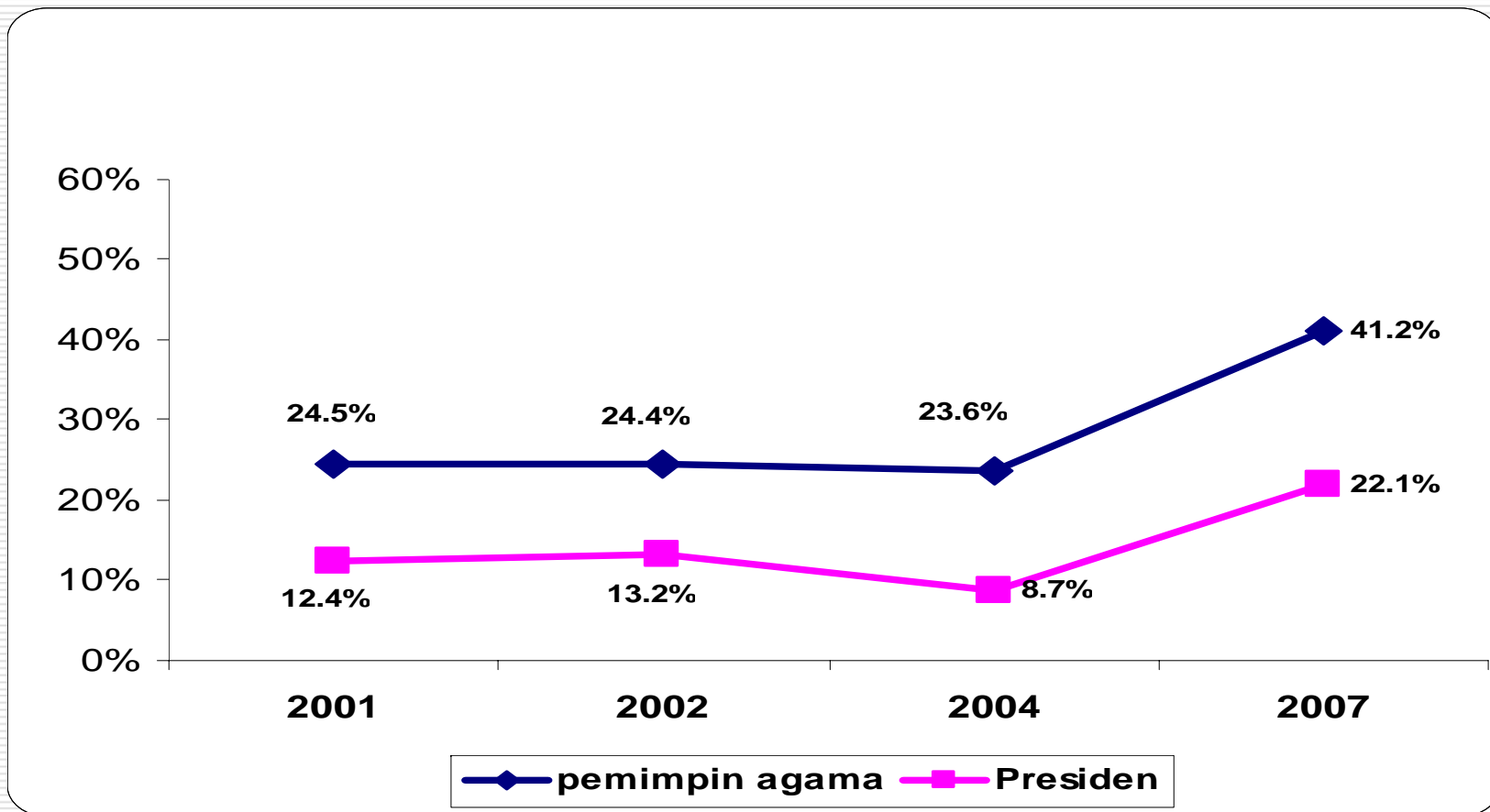
Diskusi

- Di samping intoleransi, aspek berikutnya yang berpengaruh terhadap kondisi nasionalisme, khususnya perasaan cinta terhadap tanah air, adalah kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga-lembaga negara.
 - Seperti halnya terhadap konsolidasi demokrasi, *trust* memberi kontribusi penting dalam menciptakan kondisi nasionalisme sebuah negara.
 - Hasil survey ini menyuguhkan bukti kuat bahwa *trust* masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara berada jauh di bawah *trust* terhadap lembaga agama (ulama), seperti tampak dalam tabel berikut.
-

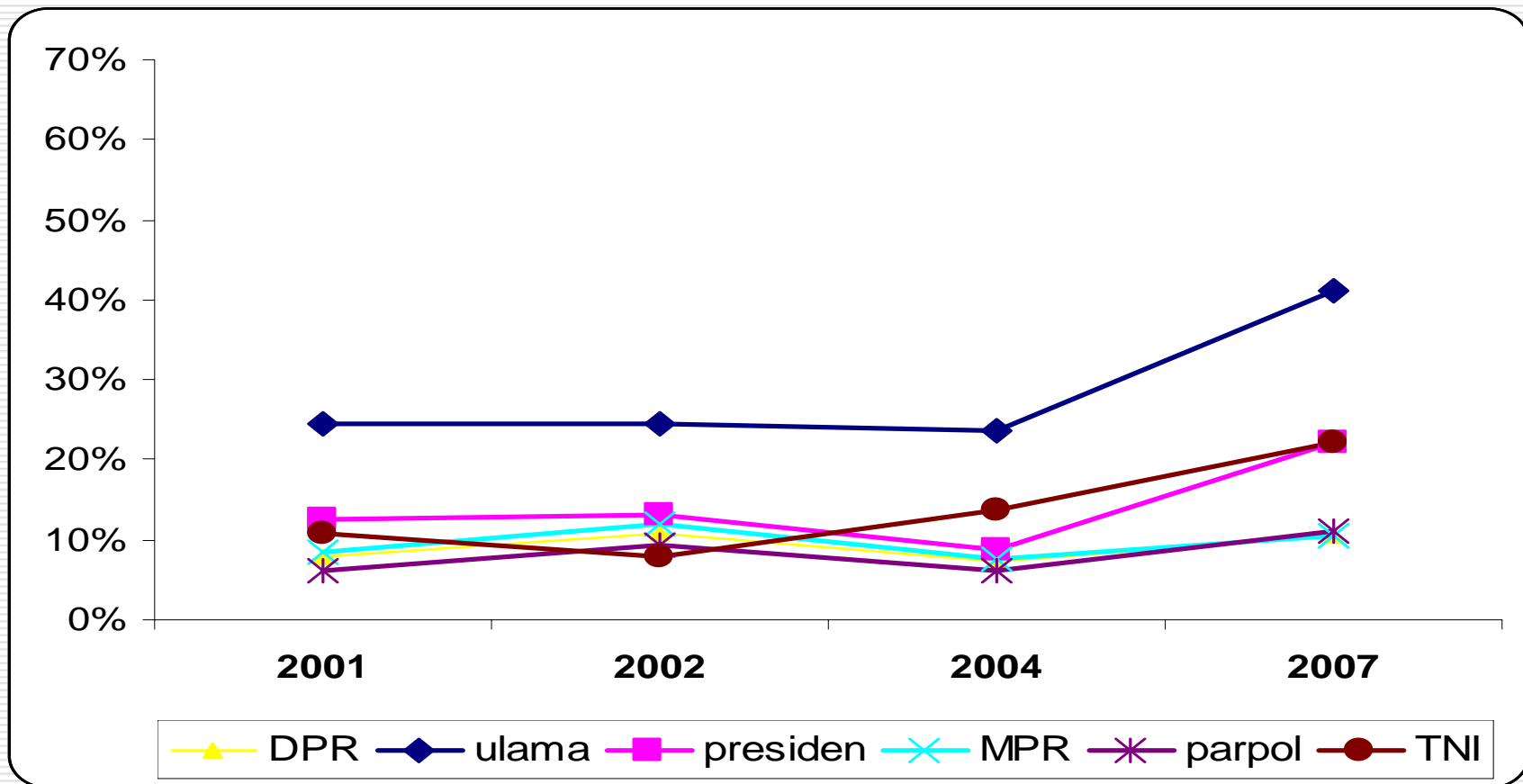
Kepercayaan terhadap institusi agama dan negara (hampir selalu percaya)



Kepercayaan kepada ulama dan presiden (hampir selalu percaya)



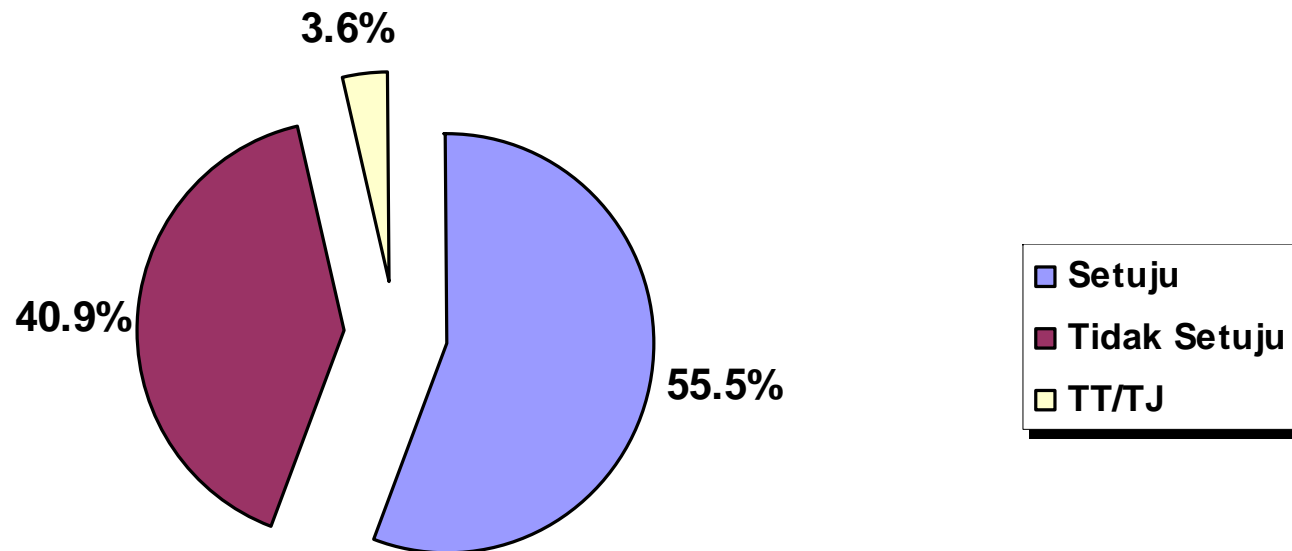
Kepercayaan kepada lembaga agama dan negara (hampir selalu percaya %)



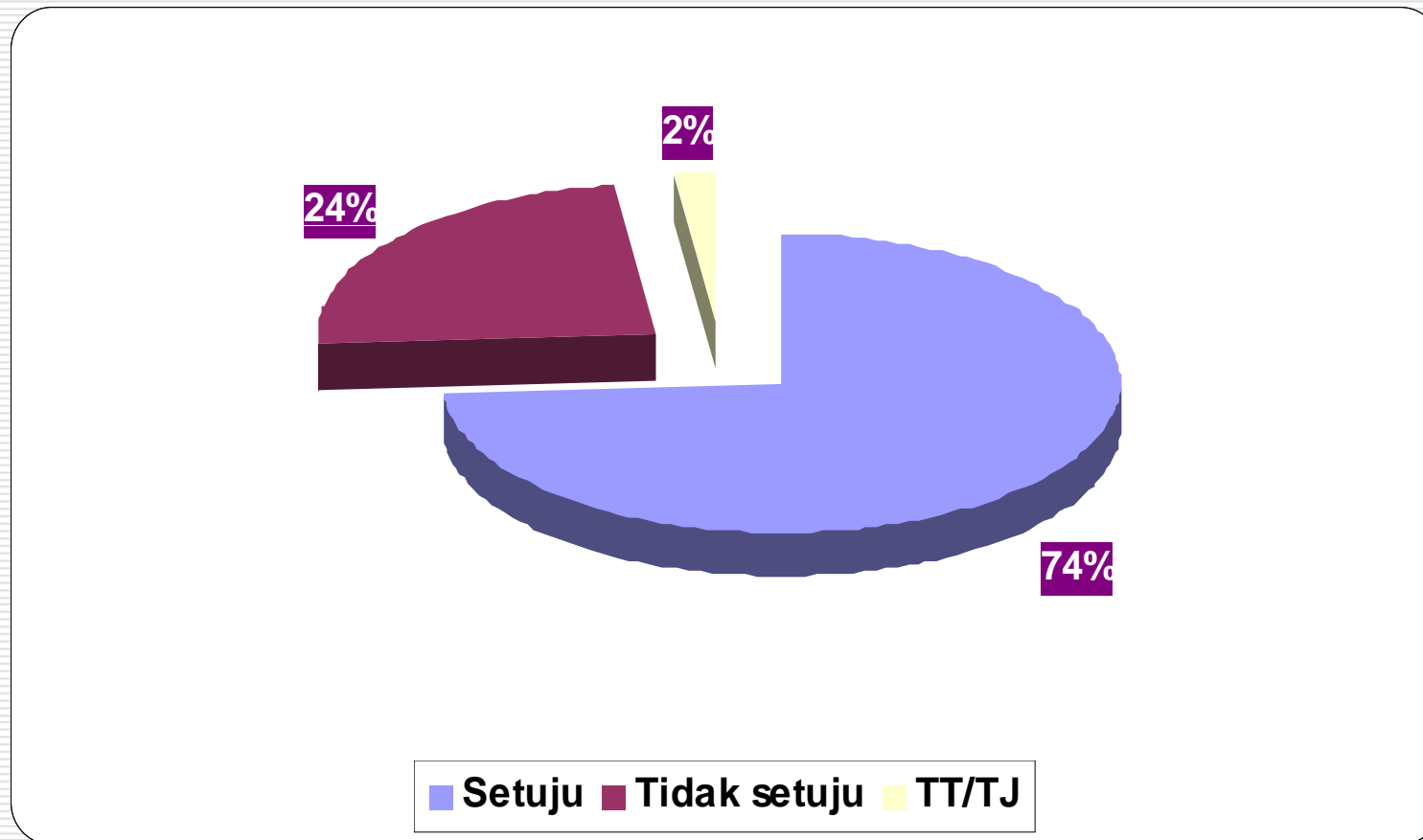
Diskusi

- ❑ Kondisi *trust* di atas menunjukkan bukti yang sejalan dengan data tentang identitas (tabel sebelumnya), di mana agama (baca: Islam) menjadi faktor sangat menentukan, di atas faktor kenegaraan dan kebangsaan.
 - ❑ Ditambah lemahnya kapasitas negara, kondisi *trust* di atas semakin memberi kesempatan kepada agama untuk masuk ke tengah arena sosial-politik dan kenegaraan.
 - ❑ Dalam lingkup daerah, hal ini tampak dari menguatnya unsur agama dan etnis lokal dalam wacana politik daerah, seperti tampak dalam tabel-tabel berikut.
-

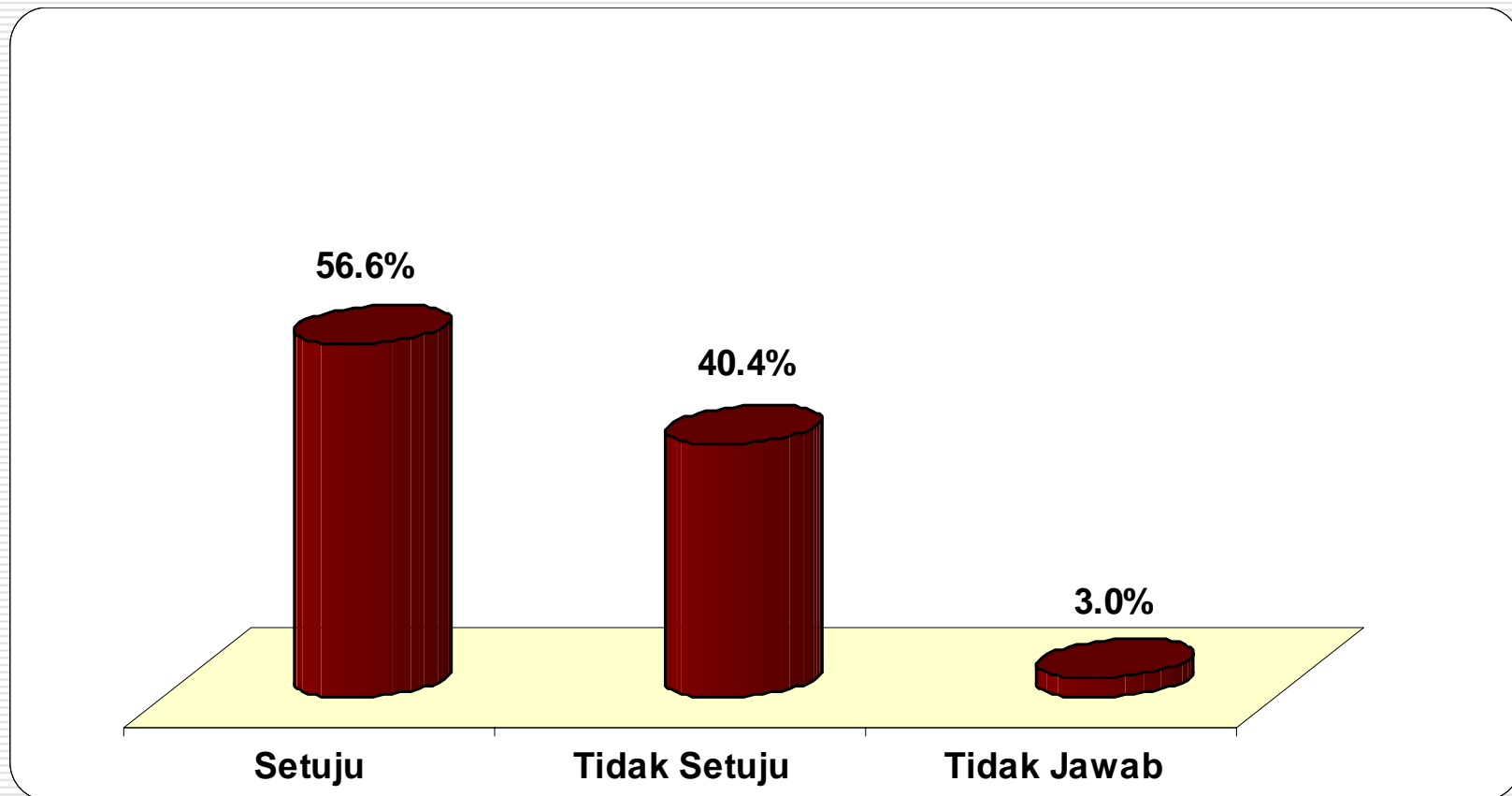
Pemerintah daerah sebaiknya memberlakukan bahasa setempat (selain bahasa Indonesia) sebagai bahasa resmi lembaga-lembaga negara di tingkat daerah



Kepala daerah (wali kota, bupati, gubernur) seharusnya dipilih dari suku asal/putra daerah di masing-masing daerah



Apakah anda setuju kepala daerah (walikota, bupati, gubernur) seharusnya dipilih dari kelompok agama mayoritas di masing-masing daerah?



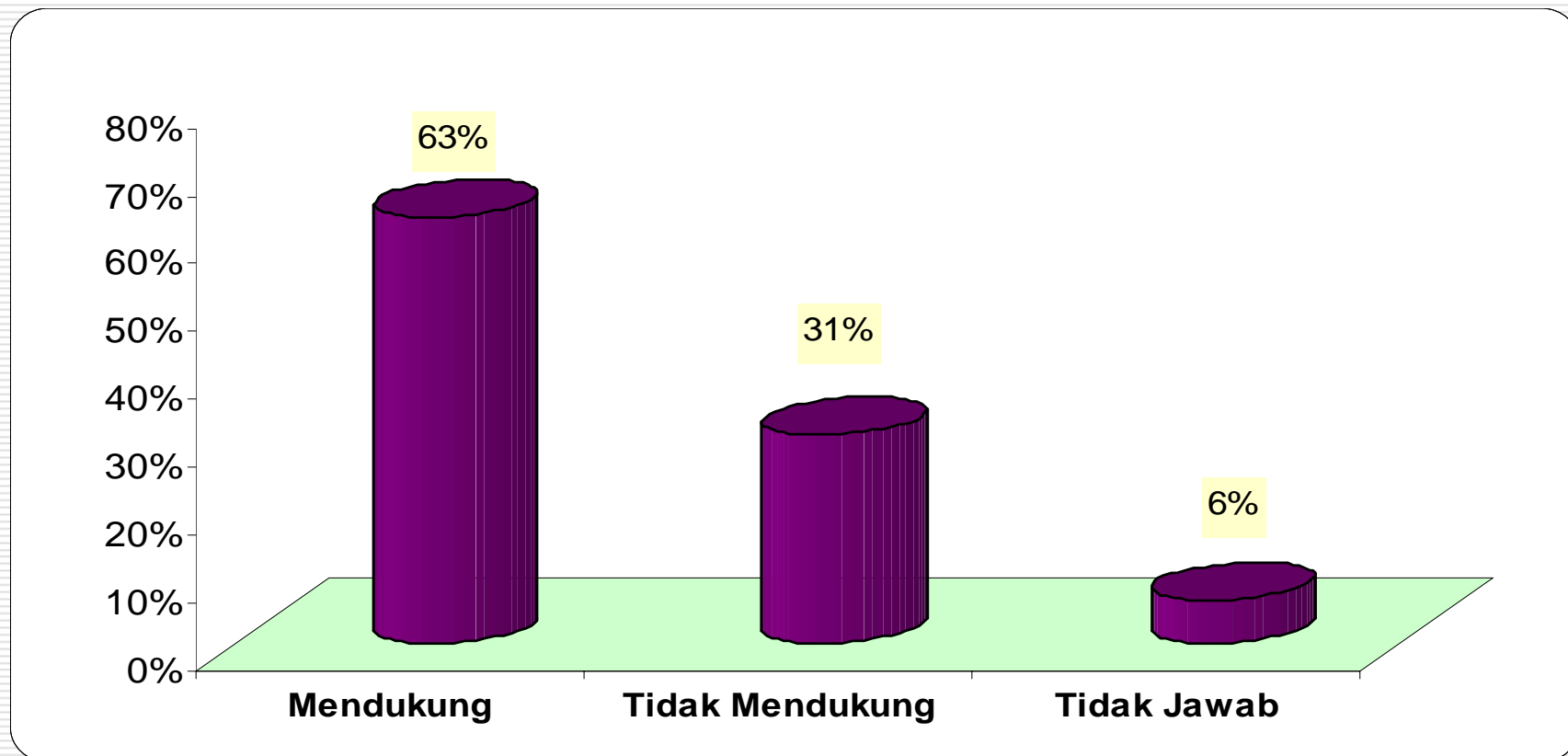
Diskusi

- Dengan demikian, bisa ditegaskan bahwa kondisi kebangsaan di Indonesia banyak berhubungan dengan faktor-faktor yang bersifat keagamaan. Islam menjadi satu *variable* yang turut menentukan wajah ke-Indonesia-an.
 - Begitu pula dengan kondisi kebangsaan Indonesia dewasa ini, seperti telah dijelaskan di awal. Bisa dipastikan bahwa dalam kondisi kebangsaan yang tidak menggembirakan ini (konflik sosial-politik dan keagamaan, integrasi nasional, dll), Islam turut memberi kontribusi.
 - Pentingnya agama *versus* bangsa dalam perumusan identitas, rendahnya *trust* terhadap lembaga negara *versus* agama, dan tingginya rasa intoleransi keagamaan merupakan indikator kuat dari poin yang disebut di atas.
-

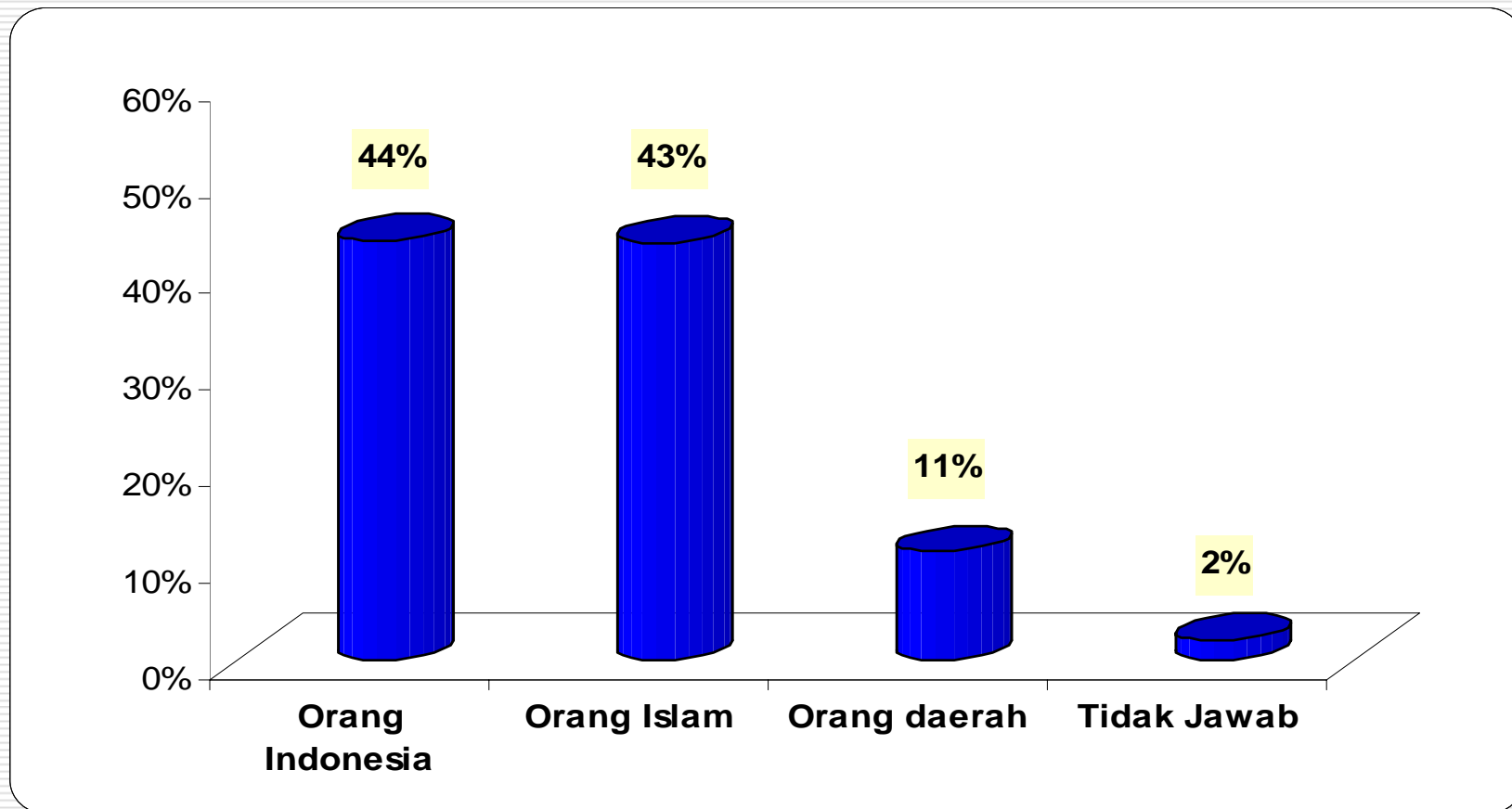
Diskusi ...

- Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pola keberagaman tertentu (seperti disebutkan poin sebelumnya) menjadi salah satu faktor yang ikut menghambat proses perkembangan masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa (dalam arti bahwa mereka terlepas dari faktor-faktor primordial dalam kehidupan sosial-politik dan kenegaraan).
 - Kondisi keislaman di atas berhubungan dengan fakta bahwa Muslim Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sebagai bagian dari umat Islam (yang bersifat internasional dan lintas negara-bangsa) yang cukup mengganggu kadar kebangsaan.
 - Hasil survey ini menunjukkan demikian (tabel berikut); dan kondisi ini semakin menegaskan problem identitas di kalangan Muslim Indonesia.
-

Perlu mendahulukan kepentingan sesama umat Islam, bahkan yang tidak sebangsa



Merasa lebih sebagai orang Indonesia, orang Islam atau orang daerah? [survey PPIM 2004]



Penutup

Semua penjelasan di atas memberikan kita satu bukti kuat bahwa usaha pengarusutamaan (*mainstreaming*) kebangsaan khususnya di atas faktor-faktor keagamaan menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak.

Wassalam
